

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA PADA DESA WISATA

IMPLEMENTATION OF TOURISM POLICY IN TOURISM VILLAGE

Angga Pramana^{1*}, Yelly Zamaya¹, Ardian¹, Afrinald Rizhan²

¹ Universitas Riau, Kampus Binawidya, Simpang Baru Pekanbaru

² Universitas Islam Kuantan Singingi Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kuantan Singingi

*Korespondensi email: pramana.angga@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Sektor pariwisata menyajikan potensi wilayahnya untuk dijadikan objek wisata yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan juga menyerap sumber daya manusia yang sangat besar. Peningkatan sumber daya perlu dilakukan agar potensi wilayah tersebut dapat dinikmati. Pemerintah perlu adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan agar pariwisata semakin baik dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Penelitian ini berfokus kepada kebijakan pemerintah provinsi dan Kabupaten Kampar terhadap perkembangan pariwisata dalam hal ini berfokus di Dusun Pulau Belimbing Desa Kuok Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau terkhusus di Desa Wisata Pulau Belimbing sudah cukup baik. Meskipun kondisi penerapan peraturan perundang-undangan saat ini masih sedikit bermasalah dalam peraturan perundang-undangan terkait sektor kepariwisataan

Kata Kunci: Implementasi kebijakan; pariwisata; desa wisata; Pulau Belimbing.

ABSTRACT

The tourism sector presents the potential of the region to become a tourist attraction that encourages regional economic growth and absorbs enormous human resources. An increase in resources needs to be done so that the area's potential can be enjoyed. The government needs government support through policies issued so that tourism is getting better and can improve the economy of the surrounding community. This research focuses on the policy of the provincial government and the Kampar Regency on tourism development, in this case focusing on the Belimbing Island Hamlet, Kuok Village, Kampar Regency. The results of this study indicate that the implementation of Riau Province Regional Regulations, especially in the Belimbing Island Tourism Village, is quite good. Although the current state of application of laws and regulations is still a bit problematic in the laws and regulations related to the tourism sector.

Keywords: Implementation policies; tourist; tourist village; Belimbing Island.

PENDAHULUAN

Kecamatan Kuok merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar yang merupakan daerah pemekaran dari Kecamatan Bangkinang. Kecamatan Kuok telah mengembangkan potensi wilayahnya sebagai desa wisata yang terletak di Desa Kuok, tepatnya di Dusun Pulau Belimbing dengan ikon unggulan wisata budaya berupa Rumah Adat Lontiok. Potensi budaya lokal yakni Rumah Lontiok Candil Kendala Emas layak dikembangkan menjadi icon Desa Wisata perlu didukung dengan media sosialisasi digital yang berkualitas. Sebagai icon wisata budaya, diperlukan tim yang mumpuni dalam hal manajemen tim wisata dan keterampilan literasi digital dan didukung dengan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan potensi adat tersebut.

Dari segi otoritas pengelolaan wilayah, sebagian besar desa di Kecamatan Kuok tergolong desa swadaya dengan ciri khas kehidupan mas-

yarakat yang masih dipengaruhi adat istiadat serta kekerabatan yang masih erat. Dalam pengelolaan potensi wilayah, adat istiadat menjadi nilai tambah sekaligus kekuatan lokal yang mendukung khususnya di bidang pariwisata. Berbagai potensi wisata di Kecamatan Kuok identik dengan nilai adat dan religi seperti wisata budaya Pacu Tongkang.

Sektor pariwisata memiliki peranan besar dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah maupun masyarakat. Bahkan di beberapa daerah didapati industri pariwisata mampu mengangkat daerah tersebut dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama (Gumelar, 2015). Beberapa Studi dalam literatur pariwisata menyebutkan bahwa pariwisata berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan (Balaguer dan Cantavella-Jorda 2002; Durbarry 2004; Dritsakis 2004; Narayan 2004; Croes dan Vanegas 2008).

Obyek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (Ridwan, 2021). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah melalui kebijakannya mengembangkan potensi obyek wisata dalam wujud pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata harus berdasarkan prinsip kesamaan, dimaksudkan agar setiap masyarakat dapat menikmati pariwisata tanpa terkecuali (Giampiccoli, 2020).

Sector pariwisata menjadi sector yang sangat bagus untuk dikembangkan, selain menyajikan potensi wilayahnya untuk dijadikan objek wisata. Sektor pariwisata mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan juga menyerap sumber daya manusia yang sangat besar. peningkatan sumber daya perlu dilakukan agar potensi wilayah tersebut dapat dinikmati. Penelitian Fakhrol (2018) Strategi pengembangan Desa Wisata Pulau Belimbing adalah menggali potensi dan mempertahankan berbagai daya tarik wisata, meningkatkan sarana prasarana, menjalin kerja sama pemerintah, investor, dan masyarakat, mempromosikan dan memasarkan desa wisata, serta pelatihan SDM lokal sebagai pemandu wisata dan pengelola.

Perlunya kerja sama antar masyarakat untuk menyediakan sumber daya yang mumpuni untuk menghasilkan desa wisata yang baik dan nyaman untuk dikunjungi, selain itu perlunya menghadirkan kegiatan wisata partisipatif dan insipiratif agar wisatawan memiliki pengalaman secara emosional terhadap objek wisata tertentu (He, Liu, & Li, 2021).

Pemerintah perlu adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan agar pariwisata semakin baik dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan peneliti dalam mengkaji permasalahan ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka. Penelitian ini berfokus kepada kebijakan pemerintah provinsi dan Kabupaten Kampar terhadap perkembangan pariwisata dalam hal ini berfokus di Dusun Pulau Belimbing Desa Kuok Kabupaten Kampar. Data dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah kebijakan-kebijakan publik kabupaten Kampar, sementara data sekunder diperoleh data buku-buku, wawancara dan artikel-artikel terkait kebijakan pariwisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Geografis

Secara geografis luas wilayah Desa Kuok adalah 6.000 Ha. Pada saat ini Desa Kuok memiliki 6 (enam) Dusun yaitu : Dusun Koto Menampung, Dusun Pl. Belimbing I, Dusun Pl. Belimbing II, Dusun Koto Semiri, Dusun Sei. Maki, dan Dusun Bukit Agung. Kondisi geografis wilayah Desa Kuok berada pada ketinggian 45 m di atas permukaan laut. Letak Desa Kuok berada di titik koordinat 100,9430 BT dan 00,3220 LU.

Kecamatan Kuok pada awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2011 tentang perubahan nama kecamatan Bangkinang Barat menjadi Kecamatan Kuok. Desa Kuok merupakan Desa dalam wilayah Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Desa Kuok secara geografis mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Sei. Kampar/Empat Balai Kecamatan Kuok.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei. Simaung/Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Terap/Desa Lereng Kecamatan Kuok.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ganting Kecamatan Salo.

Jarak kantor Kepala Desa Kuok ke Kecamatan, kabupaten dan Provinsi adalah sebagai berikut:

- a) Jarak ke ibukota Kecamatan : 2,5 KM
- b) Jarak ke ibukota Kabupaten : 12 KM
- c) Jarak ke ibukota Provinsi : 72 KM

Kondisi Demografi

a. Penduduk

Berdasarkan data statistik pada kantor Desa Kuok pada tahun 2019, yaitu jumlah penduduknya adalah 8.352 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 4.239 dan perempuan berjumlah 4.113 jiwa sedangkan jumlah kepala keluarga (kk) sebanyak 2.281, memiliki 45 RT dan 16 RW.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Laki-Laki dan Perempuan di Desa Kuok

a. Jumlah laki-laki	4239 orang
b. Jumlah perempuan	4113 orang
c. Jumlah total (a+b)	8352 orang
d. Jumlah kepala keluarga	2281 KK

Sumber : Data Desa Kuok 2020

Tabel 2. Jumlah Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Usia

Usia	Laki-laki	Perempuan
0-25 tahun	1929	1853
26 -50 tahun	1389	1364
51 - 75 tahun	791	771
Diatas 75 tahun	130	123

Sumber : Data Desa Kuok 2020

Berdasarkan tabel tersebut jumlah laki-laki dengan usia 0-25 tahun sebanyak 1929 orang dan perempuan 1853 orang, sedangkan usia 26-50 tahun laki-laki sebanyak 1389 orang dan perempuan 1364 orang. Jumlah laki-laki dengan usia 51-75 tahun sebanyak 791 orang dan perempuan 771 orang. Usia yang diatas 75 tahun, laki-laki sebanyak 130 orang dan perempuan 123 orang.

Untuk mata pencarian atau pekerjaan penduduk di desa Kuok ini pada umumnya mereka adalah wiraswasta/pedagang, pegawai negeri, buruh, pengrajin/industri kecil, TNI, tani, pertukangan, buruh tani, nelayan, pemulung, jasa. Secara umum mayoritas pekerjaan pada wilayah tersebut cenderung mengarah pada bidang pertanian dan bidang perdagangan, hal ini tentu menjadi salah satu pertimbangan nantinya dalam upaya pengembangan pariwisata yang juga memperhatikan serta mendukung jenis pekerjaan dominan pada suatu wilayah sehingga diharapkan mampu mengembangkan pariwisata kearah penguatan potensi lokal serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangannya, untuk itu diperlukan desain pengembangan pariwisata disisi lain menumbuh kembangkan objek wisata disisi lain juga menunjang kegiatan ekonomi masyarakat tempatan

Tabel 3. Jenis Mata Pencarian Warga Desa Kuok

JENIS PEKERJAAN	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	596	307
2. Buruh tani	20	12
3. TNI / Polri	6	-
4. Nelayan	5	2
5. Pegawai Negeri Sipil	75	84
6. Pengrajin industri rumah tangga	2	-
7. Pedagang / pedagang keliling	303	181
8. Peternak	90	62
9. Dokter swasta	1	2

10. Bidan swasta	-	12
11. Pensiunan PNS/ TNI/POLRI	29	17
12. Perawat swasta	5	10
13. Pembudidaya	58	-
14. Perkebunan	794	305
15. Guru Honorer	28	57
16. Buruh Bangunan	56	-
17. Buruh	58	6
18. Jasa Angkutan	21	-
19. Mekanik	33	-
20. Sopir	46	-

Sumber : Data Desa Kuok 2020

Berdasarkan tabel tersebut warga Kuok banyak yang bermata pencaharian sebagai petani, perkebunan, pedagang, peternak, dan buruh. Warga yang bermata pencaharian petani sebanyak 903 orang, perkebunan sebanyak 1099 orang, pedagang sebanyak 484 orang, peternak sebanyak 152 orang dan buruh sebanyak 120 orang. Sehingga Desa Kuok khususnya dusun pulau belimbing sangat sesuai untuk di terapkan sebagai desa wisata berbasis agroindustri.

Politik Hukum Kebijakan Pariwisata

Saat ini arah politik hukum regulasi pembangunan Pariwisata di daerah meliputi beberapa hal sebagai berikut: Pertama, politik hukum regulasi pembangunan Pariwisata daerah berbasis pada cita hukum yang diamanatkan yaitu perlindungan kelangsungan Pariwisata baik yang alam, budaya dan buatan manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengedukasi ekonomi kreatif, kerja sama internasional untuk memelihara stabilitas keamanan lokal, nasional dan global. Kedua, politik hukum harmonisasi regulasi daerah terintegrasi dalam satu kelembagaan yang dalam subordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik perencanaan, analisa dan evaluasi. Ketiga, alat uji politik harmonisasi regulasi daerah pada asas-asas dan norma hukum undang-undang, disharmoni konflik norma dan kewenangan, tujuan pembangunan pariwisata daerah yang melindungi dan mengembangkan kearifan lokal dan kesejahteraan masyarakat, menghambat pelayanan umum sehingga tidak efisien, menghambat investasi, penyederhanaan ijin perizinan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, dan capaian pembangunan Pariwisata di daerah. Keempat, Politik hukum terhadap pengujian regulasi Pariwisata daerah sesuai dengan prinsip judicial review berada dalam yurisdiksi MA berdasarkan putusan

Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 terkait pengujian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghapus kewenangan Pemerintah khususnya Kemendagri membatalkan Perda. Terakhir adalah politik hukum terhadap evaluasi regulasi Pariwisata daerah berada dalam kewenangan eksekutif (*executive review*), yang dikoordinasikan antara pemerintah daerah, unit organisasi lembaga analisis dan evaluasi regulasi di daerah (Faozi, 2020).

Kondisi Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini Permasalahan hukum dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait sektor Kepariwisata di Indonesia meliputi: a) Tumpang tindih antara regulasi pemerintah pusat dan daerah; b) Tumpang tindih antara regulasi dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaan dibawah Undang-Undang; c) Kurangnya kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan usulan dalam mensinergiskan produk regulasi daerah dengan produk regulasi pemerintah pusat; d) Tidak sesuainya produk regulasi dari pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah karena konsep pembangunan yang cenderung dirancang secara top-bottom.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai stakeholder, memiliki peranan yang besar dalam kemajuan ekonomi, politik, budaya dan sosial. Banyak peran yang dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Kampar melalui kebijakan-kebijakan yang mensupport pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar. Pemerintah kabupaten kampar melalui RUPM Kabupaten Kampar mencanangkan untuk memfokuskan Arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Kampar harus sesuai dengan RUPM Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten.

Peta panduan implementasi RUPM disusun menjadi 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu:

1. Fase I-Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and Low Hanging Fruits*);
2. Fase II-Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
3. Fase III-Pengembangan industri berskala besar;
4. Fase IV-Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan(*knowledge-based economy*).

Pemerintah Kabupaten kampar dalam RU-PMD Kabupaten Kampar menyatakan pada Fase I pengembangan pengembangan infrastruktur dan energi melalui kerja sama pemerintah-Swasta (RKS) menyatakan untuk membangun infrastruktur Pariwisata. Pembangunan ini akan mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Kampar. Menurut (Arliman S, 2018) menjelaskan bahwa peranan investasi dalam pembangunan ekonomi di bidang pariwisata sangat penting, terutama untuk memudahkan pembangunan pariwisata, dan dianggap sebagai industri yang dapat mendatangkan kemakmuran (Cro & Martins, 2017). Selain itu pengembangan pariwisata adalah kegiatan kolektif, kapasitas dan kemauan berbagai aktor yang terlibat hendaknya memiliki arah tujuan bersama (Rodriguez,& Vanneste, 2019).

Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi

Pentingnya perencanaan dan pengelolaan yang terukur serta berkesinambungan terhadap berbagai potensi pariwisata ada, serta perlunya upaya mengantisipasi berbagai dinamika kepariwisataan baik ditingkat lokal, regional maupun internasional yang muncul dan mempengaruhi kepariwisataan Provinsi Riau mendorong Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Riau untuk menyusun dokumen perencanaan kepariwisataan provinsi dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (Ripparprov) Riau (Dinas Pariwisata Provinsi Riau, 2020).

Desa pulau belimbing yang merupakan salah satu destinasi wisata dari kabupaten Kampar masuk kedalam destinasi wisata yang direncanakan untuk dikembangkan. Desa wisata Pulau Belimbing dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (Ripparprov) Riau dikategorikan sebagai destinasi dengan kategori Daya tarik wisata budaya bersifat berwujud (*tangible*). Syaiful (2021) mengungkapkan Daya tarik wisata budaya bersifat berwujud (*tangible*) adalah sebuah objek wisata yang dapat dilihat bentuk fisiknya untuk dapat di nikmati.

Sebagai catatan dalam upaya program/kegiatan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pariwisata yang ada, jangan hanya berfokus pada upaya promosi wisata, menurut temuan dalam penelitian yang dilakukan (di 284 kota China diantara tahun 2000 sampai tahun 2015 menunjukkan bahwa efek promosi pariwisata hanya bertahan selama sekitar tiga tahun. Selain itu perlu juga memperhatikan aspek pengembangan

pariwisata berbasis lingkungan. Hal ini bertujuan agar memberikan pengalaman wisata berkualitas tinggi tanpa merusak lingkungan ekologi serta memiliki keseimbangan antara pengembangan dan perlindungan pada objek wisata (Wang & Wang, 2018).

Perkembangan Pariwisata

Desa wisata pulau belimbing saat ini sudah mengalami perkembangan. Masyarakat di sekitar desa wisata pulau belimbing saat ini sudah sadar akan potensi wisata yang ada. Kesadaran masyarakat akan potensi wisata di pulau belimbing terlihat mulai aktifnya kelompok sadar wisata di desa wisata pulau belimbing yang ikut meningkatkan potensi wisata di daerah tersebut (Saputra, Riftyan, Dewi, & Hamzah, 2020).

Perkembangan wisata ini tidak luput dari dukungan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (Ripparprov) Riau Potensi wisata dari desa wisata Pulau Belimbing didukung oleh dinas pariwisata provinsi Riau. Bentuk dukungan yang dikeluarkan oleh dinas pariwisata berupa memasukkan Festival Pulau Belimbing, yang diadakan pada 10-12 April, sebagai salah satu agenda Perhelatan di Provinsi Riau Periode Tahun 2015-2020. Dukungan pemerintah daerah diperlukan dalam mempercepat perkembangan pariwisata yang ada agar meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat (Sahli & Tuti, 2021),

Perkembangan pariwisata saat ini terus berkembang, menurut hasil penelitian terhadap 150 negara di dunia, kunci utama kesuksesan pengembangan pariwisata adalah dengan memfokuskan terhadap pengembangan dan pemanfaatan potensi pariwisata yang telah ada (Dogru, Suess, & Sirakaya, 2021). Selain itu perlu juga diperhatikan bahwa wisatawan tidak hanya memilih tujuan wisata berdasarkan pada ukuran kualitas fisik wisata saja, melainkan juga karena ada ketertarikan perasaan terhubung atau afinitas terhadap objek wisata tertentu (Josiassen, Kock, & Nørfelt, 2022).

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau terkhusus di Desa Wisata Pulau Belimbing sudah cukup baik. Hal ini terlihatnya kesadaran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata dan dukungan pemerintah Provinsi Riau. Meskipun kondisi penerapan peraturan perundang-undangan saat ini masih sedikit bermasalah dalam peraturan perundang-undangan terkait sektor Kepariwisata di Indonesia meliputi: a) Tumpang

tindih antara regulasi pemerintah pusat dan daerah; b) Tumpang tindih antara regulasi dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaan dibawah Undang-Undang; c) Kurangnya kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan usulan dalam mensinergiskan; d) Tidak sesuai produk regulasi dari pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman S, L. (2018). Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 273–294. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10081>
- Balaguer, Jacint, Cantavella-Jorda, Manuel. (2002). "Tourism as a Long-Run Economic Growth Factor: The Spanish Case." *Applied Economics*, 34 (1): 877-84.
- Cró, S., & Martins, A. M. (2017). Structural breaks in international tourism demand: Are they caused by crises or disasters?. *Tourism management*, 63, 3-9.
- Croes, Robertico, Vanegas, Manuel. (2008). "Tourism and Poverty Alleviation: A Co-integration Analysis." *Journal of Travel Research*, 47 (1): 94-103.
- Dinas Pariwisata Provinsi Riau. (2020). Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (Ripparprov) Riau. Bandung.
- Dogru, T., Suess, C., & Sirakaya-Turk, E. (2021). Why Do Some Countries Prosper More in Tourism than Others? *Global Competitiveness of Tourism Development. Journal of Hospitality & Tourism Research*, 45(1), 215–256. <https://doi.org/10.1177/1096348020911706>
- Durbarry, Ramesh . (2004). "Tourism and Economic Growth: The Case of Mauritius." *Tourism Economics*, 10 (4): 389-401.
- Dritsakis, Nikolaos . (2004). "Tourism as a Long-Run Economic Growth Factor: An Empirical Investigation for Greece Using Causality Analysis." *Tourism Economics*, 10 (3): 305-16.
- Fakhrol, A. (2018). Strategi Pengembangan Desa Wisata Pulau Belimbing Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota). Universitas Islam Riau.
- Faozi, S. (2020). Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional: "Analisis dan Evaluasi Hukum Kepariwisata." Jakarta: BPHN KEMENKUMHAM.
- Giampiccoli, A. (2020). A conceptual justification

- and a strategy to advance community-based tourism development. *European Journal of Tourism Research*, 25(2020), 1–19. <https://doi.org/10.54055/ejtr.v25i.418>
- Gao, Y., & Su, W. (2021). The Disclosure of Quality on Tourism Performance: Evidence from Top Tourist Cities in China. *Journal of Travel Research*, 60(7), 1492–1509. <https://doi.org/10.1177/0047287520954540>
- Gumelar, A. . (2015). Pengaruh Kombinasi Larutan Perendaman dan Lama Penyimpanan Terhadap Viabilitas, Vigor dan Dormansi Benih Padi Hibrida Kultivar Sl-8. *Jurnal Agroteknik*, 2(2), 125–135. Retrieved from <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/Faperta/article/download/33/34/>
- He, M., Liu, B., & Li, Y. (2021). Tourist Inspiration: How the Wellness Tourism Experience Inspires Tourist Engagement. *Journal of Hospitality & Tourism Research*. <https://doi.org/10.1177/10963480211026376>
- Josiassen, A., Kock, F., & Nørfelt, A. (2022). Tourism Affinity and Its Effects on Tourist and Resident Behavior. *Journal of Travel Research*, 61(2), 299–313. <https://doi.org/10.1177/0047287520979682>
- Narayan, Paresh Kumar . (2004). “Tourism Demand Modeling: Some Issues Regarding Unit Roots, Cointegration and Diagnostic Tests.” *International Journal of Tourism Research*, 5: 369-80.
- Ridwan, M. (2021). Pengembangan Produk Pariwisata Dalam Mewujudkan Branding Pariwisata Kabupaten Samosir. *LOSARI: Jurnal Arsitektur Kota Dan Pemukiman*, 6(1), 15–21. <https://doi.org/10.33096/losari.v6i1.261>
- Rodriguez-Giron, S., & Vanneste, D. (2019). Social capital at the tourist destination level: Determining the dimensions to assess and improve collective action in tourism. *Tourist Studies*, 19(1), 23–42. <https://doi.org/10.1177/1468797618790109>
- Sahli, M., & Tuti, R. W. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim. *Kebijakan Publik*, 12(2), 81–86.
- Saputra, E., Riftyan, E., Dewi, Y. K., & Hamzah, A. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan Selai. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 2, 269–274.
- Syaiful, S. (2021). Strategi Pengembangan Tari Zapin Api Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis. *Intelektiva: Eurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 96–114.
- Wang, M. C., & Wang, C. S. (2018). Tourism, the environment, and energy policies. *Tourism Economics*, 24(7), 821-838.